PENGARUH EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK SERTA IMPLIKASINYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

(Survei Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I)

THE INFLUENCE OF EXTENSIFICATION TAXATION TO REVENUE AND IMPLICATION ON ECONOMIC GROWTH

(*Survey on Small taxpayer offices in West Java I Region)*

Oleh:

SYNTA WULANDARI

NIM. 21111143

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Komputer Indonesia

Dibimbing Oleh Lilis Puspitawati.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.

ABSTRACT

The phenomenon that occurred during the years 2011-2014, the economy in West Java that grow well was not accompanied by growth in tax revenues. This is because society as a taxpayer forget or even ignore their obligation to pay taxes. This study aims to determine how much influence extending taxation to tax revenues and to determine how much influence the tax revenue to economic growth in the Small Taxpayer Office West Java I region.

The method used in this research is descriptive and verification method. Descriptive method used to determine the variable picture of the tax extension, tax revenue and economic growth. Data Collection method used in this research is field research and Library Research. The population in this study is the Small Taxpayer Office West Java I region. The sample is nine of The Small taxpayer offices in West Java I Region. Data analysis method used is path analysis.

These results indicate that extending the tax effect positive significant tax revenue and tax revenue significantly positive effect on economic growth in the Small Taxpayer Office West Java I region.

Keywords: tax extension, tax revenue, economic growth

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan fungsi kegiatan ekonomi yang dijalankannya pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi tiga golongan dengan menjalankan peranan yang sangat berbeda dalam suatu perekonomian salah satunya yaitu Pemerintah (Sadono Sukirno, 2008: 36). Pemerintah merupakan salah satu badan yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi seperti kegiatan mengembangkan prasarana ekonomi dan social sehingga peranan pemerintah cukup aktif dalam kegiatan ekonomi karena tanpa campur tangan pemerintah maka kondisi perekonomian tidak akan seimbang (Sadono Sukirno, 2008: 36).

Peran pemerintah secara garis besar dalam perekonomian dibagi menjadi dua cara yaitu dengan kebijakan fiskal dan moneter. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan salah satu contoh dari peran pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada pilihan-pilihan pemerintah mengenai tingkat pembelanjaan dan pajak pemerintah secara

keseluruhan (Mankiw, 2006:337). Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan *Walt Whitman Rostow*, menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang pada tahap awal pemerintah akan membutuhkan investasi yang besar atau yang lebih dikenal dengan "teori dorongan kuat" (*big push theory*) (Mangkoesobroto, 1993:170).

Dengan pertumbuhan dan proses perekonomian yang baik dan berkelanjutan maka dapat dijadikan sebagai kondisi utama bagi pembangunan ekonomi, selain masalah ekonomi pemerintah juga harus dapat melakukan beberapa hal terutama dalam masalah hukum dan politik karena dengan kondisi hukum dan pemerintahan yang kondusif maka akan menunjang jalannya Pembangunan ekonomi yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar Pertumbuhan ekonomi dan tercapainya kondisi masyarakat yang makmur dan sejahtera (Siti Kurnia Rahayu, 2009: 5)

Istilah pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu misalkan satu tahun (P. Eko Prasetyo,2011). Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya (P. Eko Prasetyo, 2011). Isu mengenai pertumbuhan ekonomi yang selalu diperhatikan dalam analisis makro ekonomi adalah masalah kelesuan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu (Sadono Sukirno, 2011).

Telah dinyatakan bahwa pada umumnya berbagai ekonomi mengalami pertumbuhan yang lebih lambat daripada tingkat pertumbuhan yang secara potensial dapat dicapainya (Sadono Sukirno, 2011). Efek dari keadaan tersebut, perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh dan masalah pengangguran merupakan tantangan yang selalu harus dihadapi dan diatasi dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2011). Salah satu factor rendahnya pertumbuhan ekonomi adalah tingginya inflasi, telah dinyatakan bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2014 sangat tinggi, akibat inflasi tinggi, BI Rate pun naik dan suku bunga ikut tinggi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat (Tony Prasetiantono, 2013). Kontribusi penerimaan pajak selama ini sangat bergantung pada wajib pajak, hal ini wajar terjadi karena berdasarkan bukti empiris, diketahui bahwa sekitar 90 persen lebih penerimaan pajak berasal dari wajib pajak, kegagalan pencapaian target pajak selama empat tahun terakhir ini diyakini sebagai akibat menurunnya setoran wajib pajak tadi, yang merupakan efek dari melambatnya pertumbuhan perekonomian (Chandra Budi, 2014).

Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara tersebut mengalami kenaikan (Rahmananta, 2012). Masih menurut Rahmananta (2012), untuk mengukur pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan output dilakukan dengan menggunakan perubahan nilai moneternya (uang) yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto. Semakin tinggi nilai Produk Domestik Bruto maka pendapatan per kapita masyarakat juga meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat melalui penerimaan pajak penghasilan dan pajak lainnya (Rahmananta, 2012). Produk Domestik Bruto memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak di Indonesia. Peningkatan Produk Domestik Bruto dalam hal ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kemudian meningkatkan pendapatan per kapita yang akan selalu diikuti dengan peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya akan menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara (Rahmananta, 2012).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikatakan sudah tumbuh positif dalam beberapa tahun terakhir namun tingkat pertumbuhannya tidak diikuti dengan tingkat kualitasnya karena tidak bertumpu pada sector riil sebagai penghasil barang yang bersifat padat karya sehingga Pertumbuhan Ekonomi kini lebih banyak digerakkan oleh sector jasa dan keuangan yang berdampak pada munculnya pengangguran dan ketimpangan (Ali Masykur Musa, 2012).

Perubahan dalam penerimaan pajak atau kebijakan pajak untuk setiap jenis pajak tentu akan memberikan perubahan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tabungan bruto dan pendapatan asing domestik (Taufik Abdul Hakim dan Imbarine Bujang,

2011). Untuk mendapatkan sumber pembiayaan negara yang tinggi maka pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, kebijakan pemerintah menaikkan pajak ditengah kondisi ekonomi yang sedang krisis akan beresiko tinggi kepada para perusahaan, resiko mengalami kebangkrutan sangat tinggi yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi perekonomian hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah perusahaan sehingga penerimaan pajak pun ikut berkurang dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu akan terjadi *trade-off* antara kenaikan pajak dan penurunan pendapatan pemerintah, salah satu hal yang mendasari terjadinya *trade-off* ini yaitu efek aritmatika karena pada dasarnya besarnya pendapatan negara merupakan akibat dari tingginya penerimaan pajak namun hal itu akan mengalami titik jenuh bahkan menjadi efek negatif terhadap penerimaan karena jika kenaikan pajak semakin tinggi maka semakin melemahkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya akan semakin menurunkan penerimaan pemerintah maka, kebijakan pemerintah dalam penetapan pajak perlu kehati-hatian agar tidak membebani perusahaan tetapi tetap berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan memacu pertumbuhan ekonomi (Rizal Ritonga, 2009). Selama tahun 2009-2014, perekonomian di Jawa Barat yang tumbuh dengan baik ternyata tidak diiringi dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan *compliance* (kepatuhan) dari pihak dunia usaha harus di koreksi dan perlu di tingkatkan. (Roslan P Roeslani,2015).

Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh tariff pajak (*tax ratio*) dan basis pajak (*tax based*), peranan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya tentu menjadi factor utama dalam pencapaian Penerimaan Pajak agar sesuai dengan harapan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional terutama dalam sector perekonomian (Siti Kurnia Rahayu, 2010:25). Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25), penerimaan dari sector pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat diharapkan bagi pemerintah karena sector pajak memiliki posisi yang sangat penting dan strategi sebagi pendapatan Negara sehingga tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara, sesuai dengan fungsi pajak (*Budgetair*) yaitu sebagai sumber dana bagi negara yang digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan yang akan menunjang tumbuhnya perekonomian, segala bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana umum merupakan biaya yang berasal dari pajak oleh karena itu pajak sebagai pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan yang strategis karena dilihat dari sisi ekonomi penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandiran dalam pembangunan suatu daerah dan tentunya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara harus terus ditingkatkan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak, yakni melalui program ekstensifikasi pajak yang diupayakan seoptimal mungkin dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan penegakkan hukum.(Fiani Kawung, 2014).

Salah satu faktor penyebab penerimaan pajak yang sulit tercapai yaitu kepatuhan wajib pajak yang rendah itu dibuktikan karena masyarakat selaku wajib pajak lupa, atau bahkan mungkin mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Terlebih ditengah perubahan pandangan masyarakat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai situasi yang muncul yang memberikan kesan negatif terkait masalah perpajakan (Agus Martowardojo, 2012). Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (Agus Martowardojo, 2012). Ada tiga faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang pertama adalah pelayanan dan kehumasan, kedua adalah soal pengawasan dan faktor ketiga adalah penegakan hukum berupa penagihan aktif dan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan (Mardiasmo, 2015).

Salah satu penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak adalah warga negara yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) masih sedikit. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan ekstensifikasi pajak guna mendongkrak penerimaan pajak (Sofyan Djalil, 2015).Rendahnya realisasi penerimaan pajak itukarena masalah kepatuhan wajib pajak

(WP). Banyak WP yang tidak menyampaikan kewajiban sesuai dengan seharusnya (Bambang Brodjonegoro, 2015).Selain itu, Departemen Keuangan salah merencanakan target penerimaan pajak sehingga perolehannya meleset. Selain itu, infrastruktur di Ditjen Pajak juga tidak siap, sehingga program ekstensifikasi pajak tidak optimal, bahkan cenderung gagal (Roni Bako. 2012).

Ekstensifikasi pajak merupakan langkah yang seharusnya bisa dilakukan secara simultan guna mendorong penerimaan pajak yang saat ini mengalami perlambatan (Fitri, 2011). Kurangnya jumlah pegawai pajak dan kantor pajak di seluruh Indonesia berakibat kurangnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat sehingga berpotensi pendapatan pajak yang tidak bias digali untuk negara (Fuad Rahmany, 2014). Ketentuan perpajakan memberikan petunjuk mengenai kriteria orang pribadi dan badan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, langkah program ekstensifikasi pajak ini di arahkan pada upaya-upaya pemerintah yaitu untuk menjangkau potensi yang belum terjangkau, upaya dari program ekstensifikasi pajak diarahkan tepat pada tujuan, yaitu masyarakat yang telah ditentukan oleh ketentuan perpajakan tetapi belum atau tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya program ekstensifikasi pajak memiliki peranan penting dalam sistem administrasi perpajakan (Fiani Kawung, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul **"Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Serta Implikasinya Pada Pertumbuhan Ekonomi".**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1). Seberapa besar pengaruh program ekstensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak

2). Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Ekstensifikasi

Menurut Liberti Pandiangan (2008:65) pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut **(**Waluyo:2006) Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 06/PJ.9/2001, ruang lingkup pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, penulis menyimpulkan indikator ekstensifikasi perpajakan adalah Jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar efektif.

Penerimaan Pajak

Menurut Rimsky K Judisseno (2005:4) pengertian Penerimaan Pajak adalah pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik."

Definisi penerimaan pajak menurut Losina Purnastuti dan Rr. Indah Mustikawati (2006:54) adalah Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerimaan Pajak adalah Pemasukan dana yang berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan perekonomian.

Menurut Supadmi (2008) Kinerja Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut Realisasi penerimaan perpajakan sebagai alat bantu dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan."

Adapun indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) adalah Jumlah realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Iskandar Putong (2013:1) mendefinisikan Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam dalam suatu periode perrhitungan tertentu.

Pertumbuhan Ekonomi menurut G. Bannock, R.E Baxter dan R. Rees (2006:12) adalah proses yang tetapdari kenaikan kapasitas produktif suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Sedangkan menurut Schumpter dalam Iskandar Putong (2013:1) meyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output (pendapatan nasional) yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan tingkat tabunagan.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Merupakan proses pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari tahun ke tahun.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi menurut Iskandar Putong (2013) dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Keterkaitan Program Ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak menurut Liberti Pandiangan (2010:11) adalah Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Ditjen pajak menerapkan pola melalui ekstensifikasi bendaharawan, ekstensifikasi melalui pendataan PBB agar jumlah WP makin bertambah, dan ekstensifikasi melalui asosiasi-asosiasi usaha. Apabila asosiasi-asosiasi usaha menyadarkan para angota yang belum memil ki NPWP, maka jumlah pemilik NPWP akan semakin bertambah.

Sedangkan menurut Dr. Nufransa Wira Sakti (2014:158) keterkaitan Program Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak adalah Seperti disebutkan sebelumnya, ada dua cara untuk mengisi kesenjangan potensi penerimaan pajak, yaitu dengan insentifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Dengan melihat hasil penelitian, DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia masih mempunyai ruang untuk terus meningkatkan penerimaan pajaknya .

Adapun penelitian terdahulu ekstensifikasi perpajakan dengan penerimaan pajak berdasarkan hasil penelitian Fiani Kawung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh (2014) Hubungan kepemilikan NPWP dengan ekstensifikasi pajak dikaitkan dengan penerimaan pajak, bahwa dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, calon wajib pajak diharapkan membayar dan kemungkinan besar membayar pajaknya dari penghasilan atau pembayaran

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku selanjutnya maka realisasi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pratama manado akan meningkat.

Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Mohammad Zain (2006:6) adalah Penerimaan pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, polotik dan sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan perluasan kesempatan kerja.

Sedangkan menurut Dr. Anggito Abimanyu, 2011:41 adalah sebagai berikut Pada sisi pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan pajak, terutama PPh dan PPN. Pada sisi belanja negara, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi besaran nilai Dana Perimbangan dalam anggaran Belanja ke Daerah sebagai akibat perubahan pada penerimaan pajak".

Sedangkan menurut M. Husni Faried dan Rohmawati Kusumaningtias Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan tentang pengaruh penurunan tariff PPh wajib pajak orang pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, dan perkembangan ekonomi negara, dapat ditarik kesimpulan bahwa penurunan tariff PPh berbandin gterbalik dengan peningkatan penerimaan pajak dan perkembangan ekonomi Indonesia. Ketika tariff mengalami penurunan, makatingkat penerimaan dan tingkat perkembangan ekonomi akan mengalami peningkatan.

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi Perpajakan berpengruh Terhadap Penerimaan pajak.
2. Penerimaan Pajak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan diambil kesimpulannya. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2005:21) metode Deskriptif adalah Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan metode.

Sedangkan Metode Verifikatif menurut Mashuri (2008:45) menyatakan bahwa Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian yang akan digunakan telaah statistika yang cocok, untuk itu dalam analisis menggunakan *Path Analysis* (analisis jalur).

3.2 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh ekstensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.Data sekunder diperoleh dari data penambahan jumlah wajib pajak, data penerimaan pajakdan data laju pertumbuhan ekonomi yang telah diolah Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I.

Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer (data yang telah diperoleh langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1dan data sekunder).

Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitin ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan KPP yang berhubungan dengan variabel penelitian. Hasil dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.
b. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penulis mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada narasumber yang dapat memberikan data atau informasi. Informasi itu berupa yang terkait dengan Ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3.4 Populasi dan Sampel

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitain ini adalah 9 KPP yang terdaftar di Kantor PelayananPajak di LinkunganKanwil DJP Jawa Barat 1.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagaisampel. Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan karakteristik variable yang akan diuji, maka ujis tatistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis jalur.

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dan Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis korelasi dan determinasi.

3.6 MetodeAnalisis Data

Dalam penelitian ini, analisis jalur (path analysis) digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat, dengan tujuan menerangkan akibat langsung dan akibat tidak langsung

seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat.

Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen.

Menurut Riduan dan Kuncoro (2007:2), Model *Path Analysis* digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen).

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Nilai koefisien jalur sebesar 0,341 merupakan nilai koefisien jalur ekstensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,116 diinterpretasikan sebagai besar pengaruh ekstensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ekstensifikasi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 11,6% terhadap penerimaan pajak, sementara sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar ekstensifikasi perpajakan.

Pada sub struktur yang kedua variabel penerimaan pajak sebagai variabel penyela/antara (intervening) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (*endogenus variable*). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS 20 *for* Windows diperoleh hasil koefisien jalur penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,394 . Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,155 diinterpretasikan sebagai besar pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerimaan pajak memberikan pengaruh sebesar 15,5% terhadap pertumbuhan ekonomi sementara sisanya sebesar 84,5% merupakan pengaruh faktor-faktor diluar penerimaan pajak

Pembahasan

Pengaruh Ekstensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Ekstensifikasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak, dengan pengaruhsenilai 0,394. Hubungan positif ini menunjukan bahwa semakin baik ekstensifikasi perpajakan, maka akan diikuti oleh semakin baikpenerimaan pajak. Kontribusi pengaruh langsung ekstensifikasi perpajakan sebesar 11,6% terhadap penerimaan pajak sisanya pengaruh tidak langsung sebesar 88,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sanksi perpajakan dan penagihan pajak (Zakiah M Syahab, 2008).

Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Peneriman Pajak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan pengaruh yang senilai 0,341. Hubungan positif ini menunjukan bahwa setiap penerimaan pajak naik maka pertumbuhan ekonomi naik. Kontribusi pengaruh langsung Penerimaan Pajak sebesar 15,5% dan sisanya pengaruh tidak langsung sebesar 84,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sektor Pendpatan Asli Daerah (PAD) (Sofyan Syahnur, 2013), dan sektor Bea dan Cukai (Wasiaturrahma, 2013).

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. Ekstensifikasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Hubungan ekstensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak berada pada kriteria lemah. Masalah ekstensifikasi perpajakan yang lemah terjadi karena penambahan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak bertambah namun tidak diiringi dengan penerimaan pajak yang signifikan. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa enggan untuk membayar pajak. Kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam registrasi membayar pajak.
2. Penerimaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hubungan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi berada pada kriteria lemah. Masalah penerimaan pajak yang lemah ini terjadi karena perekonomian di Jawa Barat yang tumbuh dengan baik ternyata tidak diiringi dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, wajib pajak merasa keberatan jika penghasilan yang diterima harus dibayarkan kepada negara. Selain itu wajib pajak merasa tidak ada timbal balik atau yang dirasakan setelah mereka membayarkan pajaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, pembahasan dan uraian simpulan yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak DJP perlu menigkatkan Program penggalian proses perpajakan, dengan cara mendata jumlah penduduk yang mempunyai penghasilan tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dan DJP disarankan untuk mengejar penerimaan pajak yang selama ini tidak tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional. Selain itu Direktorat Jendral Pajak harus melakukan ekstensifikasi dengan kajian yang ada dan melihat sektor-sektor yang gemuk.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu melakukan langkah-lamgkah seperti meningkatkan sektor pajak salah satunya penerimaan pajak. Dan DJP disarankan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak, seperti memperluas penyebaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan dengan program Ekstensifikasi perpajakan.

VI DAFTAR PUSTAKA

Adolf B. Heatubun dan Robert Tambunan.2012."*Analisis Kemampuan Kontribusi Pajak Bumi dan bangunan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.Jurnal Ekonomi"* Vol. XXII No.2, ISSN: 0215-8442.

Adjat Jatmika.2014. ROL to Campus Ingatkan Pentingnya Pajak. www.m.republika.co.id / berita/video/berita/14/09/18/nc3o1u-rol-to-campus-ingatkan-pentingnya-pajak.

Agus Martowardojo. 2012.*Realisasi Pajak baru 75 persen*.http://www.jjpn.com/ read/ 2012/11 /21/147560/Realisasi-Pajak-Baru-75Persen

Agus Martowardojo.2012. Pemerintah Tidak Mampu Tagih Tunggakan Pajak Rp 46,2 Triliun.http: //finance.detik.com /read/2012/07/05/120413/1958260/ 4/pemerintah-tidak-mampu-tagih-tunggakan-pajak-rp-462-triliun

Ali Masykur Musa. 2012. *Ekonomi Indonesia Tumbuh tapi belum Berkualitas*. http://jaringnews. com /ekonomi/umum/26345/ekonomi-indonesia-tumbuh-tapi-belum-berkualitas.

Anggito Abimanyu. 2011. *Refleksi dan Gagasan Kebijakan Fiskal*. Jakarta:Gramedia.

Bambang Brodjonegoro.2015.*Menkeu:Pertumbuhan di Atas Tahun Lalu(1).* www.m.berisatu. com/ ekonomi/274118-menkeu-pertumbuhandi-atas-tahun-lalu-1.html

Chandra Budi.2014.*Agenda Pajak Menteri Keuangan*. www.m.tempo.co/read/news/2014/11/ 06/078619885/agenda-pajak-menteri-keuangan

Faisal Basri dan Haris Munandar.2009.*Lanskap Ekonomi Indonesia.Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia.*Jakarta: Kencana

Fiani Kawung, Herman Karamoy dan Winston Pontoh.2014."*Analisis Efektivitas Penerapan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado"*. Volume.14 No.01.ISSN :0853-6708.

Fitri.2011. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, II (4) : 15 – 28.

Haryani, Said Muhammad, danSofyan Syahnur.2013.Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireun.Vol.01, No.01,ISSN:2302-0172

Iskandar Putong. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Kusnendi. Drs., M.Si.2011.*Teori Makro Ekonomi "Model Fluktuasi Ekonomi Jangka Pendek".*Bandung: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.

Liberti pandiangan.2008.*Ekstensifikasi dan Equal TreatmenPajak.*

Losina Purnastuti danRr. Indah Mustikawati. 2006. *Ekonomi*.Jakarta:Grasindo

M. Husni Faried dan Rohmawati Kusumaningtias,2013. "*Analisis Pengaruh Penurunan Tarif PPH Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan PPH, dan Pertumbuhan Ekonomi Negara*".Jurnal Akuntansi.Vol.02 No.1

Mankiw, N.G. 2000.*Pengantar ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Nanga, Muana.200.*Makroekonomi:Teori Masalah dan Kebijakan*, Edisi ke-2, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurfransa Wira Sakti.2014.*Buku Pintar Pajak E-commerce. Dari Mendaftar Sampai Membayar Pajak.*Jakarta:Transmedia

P. EkoPrasetyo. 2011. Fundamental *Makro Ekonomi*.Yogyakarta: Beta Offset

Rahmananta.2012. *Pengaruh Produk Domestik Bruto dan SBI Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia*. QE Journal Vol.01-no.01-28 2012

Rimsky K Judisseno.2005. *Pajak dan Strategi Bisnis.Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*.Jakarta: Gramedia

Rizal Ritonga. 2009. *Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi*. http://www .unisosdem.org/ekopol_detail.

Roni Bako. 2012. *Target Penerimaan Pajakdalam APBN 2013 tidakrealistis.* http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/29/83947/target_penerimaan_pajak_dalam_apbn_2013_tidak_realistis/.

Sadono Sukirno.2011. *Makro Ekonomi Teori pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka

Septian Sukma.2015. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumendang.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Sofyan Djalil.2015. Dari Pajak, Situasi Penerimaan Negara Sangat Mengkhawatirkan.www.m.beritasatu.com/ekonomi/260124-dari-pajak-situasi-penerimaan-negara-sangat-mengkhawatirkan.html

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu.2006.Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu, Jakarta: Kencana

Sugiyono.2011.*Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*Bandung:Alfabeta

Taufik Abdul Hakim dan Imbarine Bujang, 2011."*The Impact and Consequences of Tax Revenues' Components on Economic Indicators: Evidence from Panel Group Data*".International Research Journal of Finance and Economics ISSN 1450-2887 Issue 63.

Tony Prasentiantono.2013.Pasar *Sudah Tidak Sabar Menyambut Pemerintahan Baru*.www.touch.jaringnews.com/index.php/politikperistiwa/interview/52339/tony-prasentiantono-Pasar-Sudah-Tidak-Sabar-Menyambut-Pemerintahan-Baru.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Lina Ismawati, 2009*. Penulisan Karya Ilmiah.*Bekasi:Genesis

Waluyo.2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: SalembaEmpat

Waluyo danWirawan B Ilyas.2003 *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat

Wasiaturrahma.2013.*Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Penerimaan Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*.Volume.07,No,02,ISSN:77-148

PeraturanPerundang-Undangan

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-116/PJ/2007 tentang Ektensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik danPegawai Melalui Pemberi Kerja/ Bendaharawan Pemerintah

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-13/PJ/2007 tentang Biaya Pelaksanaan dan Penyediaan Sarana Penunjang Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib pajak dan Intensifikasi Pajak